

MEMBANGUN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Armando Haratua dan Chandra Wijaya

Program Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Kampus UI, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia

Email : armando.h.siagian@gmail.com dan wijaya@ui.ac.id

Abstract: Building Entrepreneurial Ecosystems for Micro and Small Businesses in Indonesia: A Literature Review. Micro and small businesses play a strategic role in reducing poverty and unemployment in Indonesia. Despite its important role, the ratio of micro and small businesses in Indonesia is still inadequate to sustain the national economy. There are various problems experienced by micro and small businesses, such as capital, human resources, regulations, government support, social culture, and lack of support from educational institutions. These problems are part of the entrepreneurial ecosystem, which is a theoretical approach to entrepreneurship development. The entrepreneurial ecosystem is composed of culture, policy, finance, human resources, markets, institutions and infrastructure that must be linked and coordinated both formal and informal. The entrepreneurial ecosystem in Indonesia needs to be developed into an ecosystem that supports each other among the actors and the factors within it in order to have a positive influence on micro and small businesses. Research on entrepreneurial ecosystems in Indonesia needs to be improved and developed in order to provide a conceptual description of the entrepreneurial ecosystem that matches the character of entrepreneurship in Indonesia.

Key Words: entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship, SME.

Abstrak: Membangun Ekosistem Kewirausahaan untuk Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Usaha mikro dan kecil berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Meskipun perannya penting, rasio usaha mikro dan kecil di Indonesia masih belum memadai untuk menopang ekonomi nasional. Terdapat berbagai permasalahan yang dialami usaha mikro dan kecil yaitu permodalan, sumber daya manusia, regulasi, dukungan pemerintah, sosial budaya, dan kurangnya dukungan institusi pendidikan. Masalah-masalah tersebut merupakan bagian dalam ekosistem kewirausahaan, yakni sebuah pendekatan teoritis untuk pengembangan kewirausahaan. Ekosistem kewirausahaan tersusun dari budaya, kebijakan, keuangan, sumber daya manusia, pasar, kelembagaan dan infrastruktur yang harus terkait dan terkordinasi baik formal maupun informal. Ekosistem kewirausahaan di Indonesia perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung di antara para aktor dan faktor di dalamnya guna memberikan pengaruh positif bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian mengenai ekosistem kewirausahaan di Indonesia perlu ditingkatkan dan dikembangkan supaya dapat memberikan konsepsi gambaran ekosistem kewirausahaan yang cocok dengan karakter kewirausahaan di Indonesia.

Kata Kunci: ekosistem kewirausahaan, wirausaha, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha mikro dan kecil adalah asset berharga untuk pembangunan, berfungsi sebagai motor untuk pertumbuhan dan alat untuk redistribusi kekayaan (Epargne Sans Frontière, 2009). Usaha mikro dan kecil menjadi bagian fundamental untuk mening-

katkan angka pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro dan kecil juga telah membuktikan diri menjadi pilar ekonomi yang kuat dan tahan terhadap terpaan krisis ekonomi dan melanjutkan perkembangannya sampai sekarang. Usaha dengan skala mikro dan

kecil yang menjadi penyumbang terbanyak untuk lapangan kerja, memiliki investasi riil dan bersifat lebih fleksibel dibanding usaha skala besar (Berry, et al.,2001). Melalui investasi dan konsumsi mereka, usaha mikro dan kecil menciptakan nilai dan menghasilkan sejumlah besar barang dan jasa, sehingga memainkan peran penting dalam mendanai layanan publik dan menciptakan ekonomi lokal yang dinamis (Goudreault dan Hébert, 2013).

Isu demografi dan pengangguran juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan UMKM. Data BPS pada bulan Agustus 2019 menunjukkan terdapat Angkatan kerja Indonesia berada pada 133,56 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2019 sebesar 5,28%. Selain itu terdapat 126,51 juta angka penduduk bekerja yang di dalamnya terdapat pekerja paruh waktu sebanyak 28,41 juta orang dan pekerja setengah menganggur sebanyak 8,14 juta orang. Angka-angka tersebut perlu diperhatikan karena berpotensi meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang menurut proyeksi Bappenas akan ada sebanyak 305.652.400 juta penduduk Indonesia pada

tahun 2035. Kondisi tersebut memerlukan terobosan kebijakan dan solusi yang signifikan untuk meminimalisir dampak sosial terkait laju demografi dan tingkat pengangguran.

Di Indonesia, UMKM membuktikan diri selalu berperan untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri. Dimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,22% dalam periode lima tahun terakhir atau naik dari angka 96,99% pada tahun 2014. UMKM menjadi sebuah fenomena penyedia lapangan kerja dan kesempatan kerja dan berperan strategis dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja sebesar 116.978.631 orang pada tahun 2018 atau bertumbuh sebesar 547.407 orang pada periode yang sama di tahun 2017. Selain porsi yang mengambil 99,9% pangsa usaha di Indonesia, bila dibandingkan dengan usaha besar yang justru mengalami penurunan dengan penurunan tenaga kerja sebanyak 209.446 orang, maka bisa dipahami bahwa usaha mikro dan kecil adalah jenis usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik dalam fungsi membantu menurunkan angka pengangguran.

Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar di tahun 2017 – 2018

No	Jenis	2017		2018		Perkembangan dari 2017 - 2018	
		Jumlah (Unit)	Pangsa	Jumlah (Unit)	Pangsa	Jumlah (Unit)	%
1	UNIT USAHA (A+B)	62.928.077		64.199.606		1.271.529	
	A. UMKM	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99	1.271.440	2,02
	U Mikro	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	1.243.322	2,00
	U Kecil	757.090	1,20	783.132	1,22	26.043	3,44
	U Menengah	58.627	0,09	60.702	0,09	2.075	3,54
	B. Usaha Besar	5.460	0,01	5.550	0,01	90	1,64
2	TENAGA KERJA (A+B) (Orang)	120.260.177		120.598.138		337.961	0,28
	A. UMKM	116.431.224	96,82	116.978.631	97,00	547.407	0,47
	U Mikro	105.509.631	87,73	107.376.540	89,04	1.866.909	1,77
	U Kecil	6.546.742	5,44	5.831.256	4,84	-715.486	-10,93
	U Menengah	4.374.851	3,64	3.770.835	3,13	-604.016	-13,81
	B. Usaha Besar	3.828.953	3,18	3.619.507	3,00	-209.446	-5,47

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2019

Setidaknya terdapat 58 juta kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara mandiri dan sebesar 1,65 % dari angka tersebut telah bertransformasi menjadi pengusaha yang berkembang dari posisinya sebagai pemula, atau dalam kata lain mereka telah naik kelas menjadi pengusaha dan dapat meningkatkan skala usahanya sendiri. Peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia makin nyata di mana sekitar 99,9 persen unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM. Meskipun begitu bila berbicara rasio wirausaha Indonesia dengan basis dari data BPS pada tahun 2016 bahwa terdapat 252 juta penduduk Indonesia dan di dalamnya terdapat wirausaha menetap sebanyak 7,8 juta atau sebesar 2,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Prosentase tersebut terhitung kecil dan belum mencapai angka ideal menurut David McClelland (Hermanto, 2017) dimana tingkat kewirausahaan Indonesia baru melampaui 2% dari populasi penduduk, yang bila dibandingkan dengan rasio wirausaha pada negara lain, rasio di Indonesia lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asia seperti Malaysia dengan prosentase 5%, lalu Tiongkok di 10%, selanjutnya Singapura di angka 7%, Jepang dengan 11% maupun AS yang 12%. (Majalah *cooperative*. Kemenkop dan UMKM RI. Maret 2017). Rasio 2% belum cukup untuk dapat menjadikan usaha mikro dan kecil sebagai fondasi ekonomi Nasional, diharapkan bahwa minimal rasio wirausaha dengan jumlah penduduk adalah sebesar 5% atau dengan kata lain, secara Nasional diperlukan sekurang-kurangnya 12,6 juta wirausaha untuk menghasilkan fondasi ekonomi yang kuat di Indonesia.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yakni terkait dengan permodalan yang mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil mengandalkan modal sendiri yang cenderung terbatas. Peraturan investasi yang dianut oleh bank kurang menguntungkan pengusaha pemula dengan masalah akses ke modal untuk pengusaha pemula yang dipenuhi dengan hambatan (Hermanto, 2017). Pembiayaan

modal dalam perusahaan kecil sangat sulit untuk didapatkan, mahal dan sering tidak diinginkan karena alasan-alasan tertentu (Cassar, 2014). Lembaga seperti venture capital dan angel investment kurang tertarik dalam memberikan modal pada usaha mikro dan kecil karena berisiko tinggi dan belum memperlihatkan potensi pertumbuhan (Cassar, 2014). Usaha mikro dan kecil kesulitan mengakses permodalan dari bank atau lembaga keuangan lainnya dikarenakan para pelaku usaha dianggap kurang feasibel bagi perbankan (*non bankable*). Kendala yang sering ditemui adalah usaha mikro dan kecil sulit untuk memenuhi prinsip syarat 5C (character, capacity, capital, collateral, and conditions) dalam kredit (Brodjonegoro, 2016). Prinsip 5C perlu dilakukan penyesuaian untuk mensasar UMKM karena sering terkendala akan asset yang dimiliki oleh Usaha Mikro dan Kecil yang nilainya tidak cukup untuk dijamin kepada pihak bank. Hal itu sejalan dengan survey yang dikeluarkan *International Financial Corporation World Bank* pada tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pada Lembaga keuangan di Indonesia mensyaratkan 73% adalah jaminan dalam bentuk asset tetap (*fixed asset*) sedangkan pada kenyataannya, para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia memiliki 45% berbentuk barang bergerak, 33% adalah piutang dan 22% merupakan asset tetap. Sehingga terdapat gap yang sangat besar antara asset yang dimiliki pelaku usaha dengan persyaratan pada Lembaga keuangan yakni sebesar 51%.

Statistik yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, pengusaha belum memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian negara. Kewirausahaan bisa menjadi cara strategis dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, jika kewirausahaan dapat berjalan dengan lancar, masyarakat tidak akan lagi bergantung pada pemerintah karena dapat menyelesaikan masalah ekonomi melalui kreativitas dan inovasi (Hermanto & Suryanto, 2017).

Usaha mikro dan kecil sangat jarang tumbuh berkembang menjadi usaha menen-

gah atau besar dalam waktu singkat (Sorama & Joensuu, 2016). Orientasi usaha mikro dan kecil tergolong rendah dan jarang untuk berkembang atau naik kelas karena para pelaku usaha beranggapan bahwa usahanya cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar (Autio, 2014). Pelaku usaha memiliki keengganan untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki agar dapat mengembangkan usahanya bahkan untuk wilayah daerah Nordik Eropa, tercatat hanya sebesar 8% pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki orientasi bertumbuh menjadi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekspor (Nordic Growth Entrepreneurship Review, 2015). Meskipun ada minat luas dalam kewirausahaan dengan menjadikannya sebagai cara untuk memecahkan tantangan sosial yang muncul seperti pengangguran, namun belum terdapat kebijakan eksplisit yang menargetkan lahir dan tumbuhnya usaha (Autio et al. 2014).

Masalah sumber daya manusia (SDM) pengusaha yang relatif rendah juga menjadi tantangan kemajuan usaha mikro dan kecil. Hal ini tercermin dari kurangnya kemampuan manajerial dalam menerapkan strategi bisnisnya. Kurangnya pemahaman tentang sektor bisnis yang dia tuju juga menunjukkan rendahnya kapasitas sumber daya manusia (Hermanto & Suryanto, 2017). Selain itu, ketidakmampuan untuk mengelola administrasi, keuangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis internet masih melekat dalam praktik kewirausahaan di Indonesia (Hermanto & Suryanto, 2017).

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa aktor-aktor individu yang terlibat langsung dalam pengembangan kebijakan usaha mikro dan kecil lama diabaikan (Arshed et al., 2014; Xheneti, 2017). Selain itu, pengembangan kebijakan untuk usaha mikro dan kecil yang lahir dari proses politik yang tidak objektif atau netral (Smallbone, 2016), yang justru didorong oleh dominasi aktor individu tertentu seperti pejabat pemerintah, peneliti, maupun LSM - yang bertindak dalam konteks tertentu. Lingkungan politik, hukum dan peraturan sangat penting untuk dapat mendukung lahir dan berkem-

bangnya usaha mikro dan kecil, karena banyak kendala yang dihadapi oleh usaha-usaha ini berasal dari aturan dan regulasi yang ada (Hobohm, 2001). Dengan kata lain, lingkungan di mana usaha melakukan bisnis harus kondusif atau menguntungkan bagi perkembangan mereka.

Seluruh hal yang disampaikan di atas adalah bagian dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Pendekatan ekosistem kewirausahaan sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir sejak dikenalkan definisi konsep ekosistem wirausaha yang mengacu pada interaksi yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan institusional dan individu sehingga dapat mendorong kewirausahaan, inovasi dan pertumbuhan UKM (Isenberg 2010). Berdasarkan laporan tahun 2018 dari Aspen Network of Development Entrepreneurs, yang adalah sebuah organisasi pendorong kewirausahaan di negara-negara berkembang, menjelaskan bahwa ekosistem kewirausahaan mencakup delapan bidang, yakni: kebijakan, keuangan, *human capital*, pasar, dukungan bisnis, infrastruktur, penelitian & pengembangan, dan budaya. Pembinaan kewirausahaan dilakukan melalui sebuah rangkaian keterkaitan aktor dan faktor pendukung dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan, perlu dilahirkan ekosistem yang memudahkan lahir dan tumbuhnya wirausaha, memberikan akses pelatihan, bimbingan, pembiayaan dan network (Indonesian Development Forum, 2019). Wirausahawan bukan lahir dengan sendirinya melainkan melalui sebuah proses dan berkembang dengan baik di dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Konsep ekosistem kewirausahaan ini penting untuk diperhatikan, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan melalui konsep ini tergambar sebuah ekosistem yang memiliki system jaringan yang dapat mengatur secara mandiri dan berguna untuk mendukung sebuah persaingan (Isenberg, 2010).

Secara umum, ekosistem kewirausahaan tersusun dari kemudahan akses pasar, adanya sumber daya manusia, modal dan pembiayaan, jejaring pendukung

(mentor, konsultan, inkubator, jaringan wirausaha), kebijakan dan peraturan, pelatihan dan sosialisasi, ketersediaan Lembaga pendidikan, dan dukungan factor sosial budaya (Isenberg. 2011). Model dari ekosistem kewirausahaan sejatinya mentitikberatkan keterkaitan antar aktor untuk dapat menghasilkan kewirausahaan yang produktif dan melahirkan wirausaha baru (Stam and Spigel 2016). Pendekatan ekosistem kewirausahaan berisikan seperangkat aktor dan faktor yang terkait dan terkordinasi baik secara formal maupun informal yang saling berhubungan satu sama lain, saling mengatur dan memperantarai seluruh kinerja wirausaha mulai dari tahap awal yang melahirkan wirausaha baru sampai pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing (Purbasari, 2019). Ekosistem kewirausahaan telah menjadi sebuah pendekatan yang banyak digunakan, namun, penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor dan aktor-aktor saling berinteraksi dan dapat mengarah pada hasil pembangunan ekonomi yang diinginkan belum bisa dikatakan maksimal. Hal tersebut terjadi jelas, tujuan dari berbagai pemangku kepentingan dan aktor dalam ekosistem kewirausahaan berbeda, tetapi pada saat yang sama dapat secara substansial tumpang tindih.

Pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang baik, hal itu ditunjukkan melalui penilaian dari *Global Entrepreneurship Index* yaitu indeks aktivitas ekonomi yang disusun oleh *Global Entrepreneurship and Development Institute* yang melihat bagaimana masing-masing negara di dunia mengalokasikan sumber daya untuk mempromosikan kewirausahaan menghasilkan penilaian bahwa kualitas dan dinamika ekosistem kewirausahaan Indonesia masih berada di bawah negara tetangga seperti Thailand pada peringkat 71, Malaysia pada peringkat 58, terlebih Singapura pada peringkat 27 dengan menempatkan Indonesia di posisi ke-94 dari 137 negara di dunia. Laporan tersebut secara rinci mengindikasikan bahwa belum tercipta ekosistem

kewirausahaan yang dapat menghasilkan masyarakat Indonesia untuk memulai bisnis tergolong rendah. Penilaian GEI ini mencatatkan nilai Indonesia sebesar 21 secara keseluruhan dan 53 pada nilai individual serta 48 pada nilai institusi. Sedangkan bila kita perbandingan dengan negara-negara yang tergabung dalam G20, pada laporan *Ernst and Young* memposisikan Indonesia dalam kuartil keempat yang berarti bahwa Indonesia memiliki ekosistem kewirausahaan yang tergolong dengan ranking terendah. Sebagai catatan yang diberikan apabila Indonesia mampu meningkatkan nilai setinggi 31 maka diperkirakan akan diperoleh US\$535 juta untuk pemasukkan negara apabila didukung oleh ekosistem kewirausahaan yang baik untuk merangsang inovasi, mendorong transaksi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan sektor pekerjaan. Kita dapat memprediksi prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan melihat bagaimana negara menyediakan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Sehingga hal tersebut dapat memberikan keyakinan bahwa ekosistem kewirausahaan sebagai pilihan yang tepat untuk keberhasilan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.

METODE

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengembangan usaha mikro dan kecil melalui kerangka ekosistem kewirausahaan dengan menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa pengkajian terhadap jurnal penelitian, kajian, disertasi, serta media massa yang relevan. Artikel ini akan dibangun dan dikonstruksi berbasis penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan dan memetakan 32 (tiga puluh dua) artikel dan kajian terkait untuk dapat memberikan dasar teoritis mengenai pengembangan model ekosistem kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.

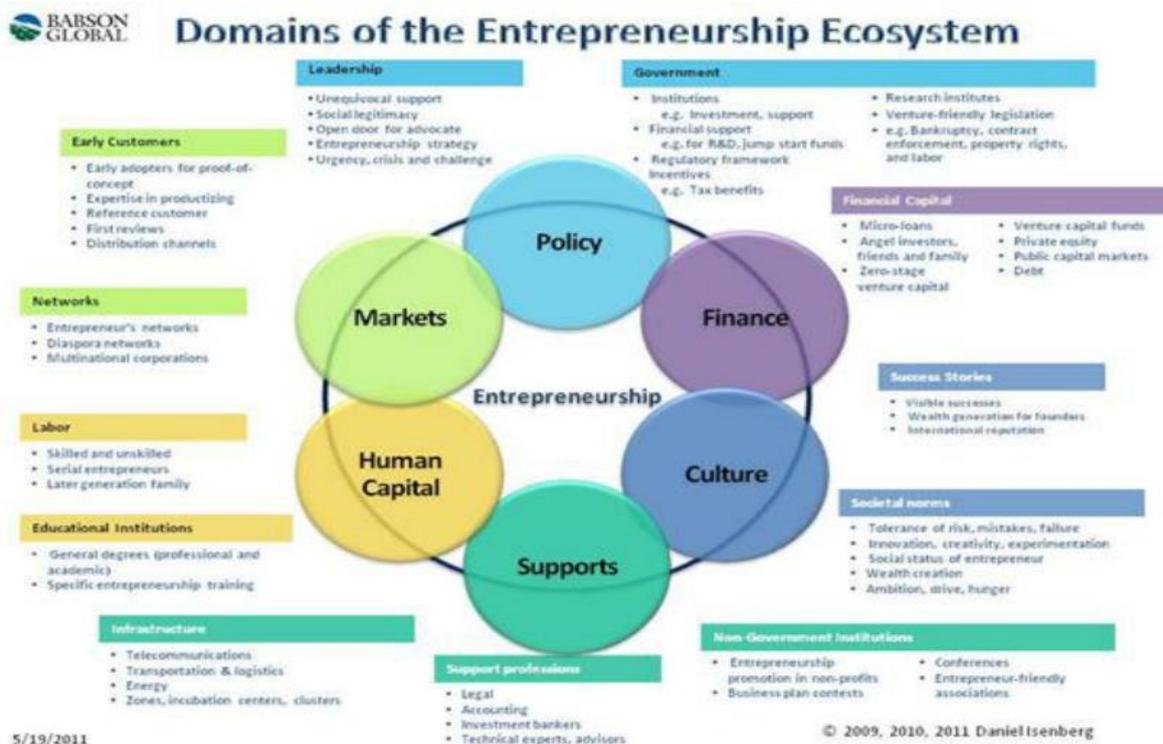
PEMBAHASAN

Ekosistem mulai dikaitkan dengan dunia bisnis dengan lahirnya ekosistem kewirausahaan yang menyatakan bahwa bisnis bukan lahir dari ruang kosong dan dalam bisnis ada hubungan interaksi yang terjadi antar para aktor yang berkepentingan untuk pertumbuhan perusahaan (Moore, 1993 dalam Purbasari 2019). Di dalam sebuah ekosistem yang bersifat dinamis, usaha yang baru mempunyai kesempatan lebih untuk bertumbuh dan menghasilkan lapangan kerja disbanding dengan usaha yang telah ada (Rosted, 2012 dalam Purbasari, 2019).

Selanjutnya istilah *Entrepreneurial Ecosystem* atau Ekosistem Kewirausahaan diperkenalkan pertama oleh Daniel Isenberg (2010) melalui tulisannya *How to start an Entrepreneurial ecosystem* dan kemudian dilengkapi melalui tulisannya di *Institute of International European Affair* pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa secara umum, ekosistem kewirausahaan terdiri dari kemudahan akses pasar, adanya tenaga kerja, akses permodalan, system pendukung (seperti mentor, konsultan dan incubator), ke-

bijakan dan peraturan, infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan, dukungan dari Lembaga pendidikan tinggi dan juga dukungan sosial-budaya.

Pada kesempatan itu Isenberg menyatakan bahwa struktur dalam ekosistem kewirausahaan mencakup 6 (enam) pilar yang menjadi pembentuknya, yakni (i) kondusivitas budaya (adanya toleransi pada resiko dan kegagalan, pandangan positif dalam kewirausahaan); (ii) kepemimpinan dan pembuatan kebijakan yang mendukung seperti insentif, aturan/regulasi, kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung (insentif regulasi, dukungan lembaga publik); (iii) Adanya pembiayaan yang memadai (kredit mikro, permodalan ventura, dsb); (iv) *Human capital* / sumber daya manusia (SDM) (Lembaga pendidikan dan pelatihan, keterampilan SDM); (v) Ketersediaan pasar dan kemampuannya menyerap produk; dan (vi) Dukungan Lembaga lain serta infrastruktur (Bidang hukum, legal, akuntansi, komputerasi dan IT serta kelompok kewirausahaan).



Gambar 1. Domain dari Ekosistem Kewirausahaan

Sumber : Isenberg, 2011

Walaupun istilah ekosistem kewirausahaan telah populer tetapi masih banyak pendapat dan teori yang disusun oleh para peneliti dan praktisi yang membuat belum adanya penerimaan Bersama tentang definisinya. Sebagian praktisi dan peneliti melihat ekosistem sebagai fasilitator di mana aktor-aktor berinteraksi dan bekerja untuk sebuah hasil baru (Malecki, 2018). Penjelasan lain tentang ekosistem yang terkait dengan kewirausahaan juga diberikan oleh Stam dkk dalam tulisannya yang menerangkan bahwa sebuah ekosistem di dalam kewirausahaan adalah sebuah hasil terkait dengan performa dalam sistem ekonomi. Hal itu berdasar pada dasar dari adanya ekosistem adalah kegiatan yang bertujuan ekonomis karena akan menghasilkan input, output dan outcome di antara aktor-aktor dalam ekosistem.

Ekosistem wirausaha adalah konsep yang relatif baru, yang memiliki beberapa definisi dan belum adanya definisi bersama. Konsep ekosistem kewirausahaan menekankan bagaimana kewirausahaan dimungkinkan tercipta oleh serangkaian sumber daya dan aktor yang secara komprehensif memiliki peran penting untuk dimainkan dalam seluruh tindakan kewirausahaan. Dalam ekosistem kewirausahaan disadari bahwa sebagian besar seringkali tampaknya bersifat lokal dimana sebuah ekosistem akan berbeda dari daerah satu ke daerah lain, ekosistem kewirausahaan seringkali terikat dengan kontak sosial atau mobilitas lokal di sebuah daerah yang belum tentu dimiliki daerah lain (Stam 2014). Stam (2014) juga mendefinisikan ekosistem wirausaha sebagai seperangkat aktor yang saling tergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan tindakan kewirausahaan.

Tabel 2. Definisi tentang *Entrepreneurial Ecosystem*

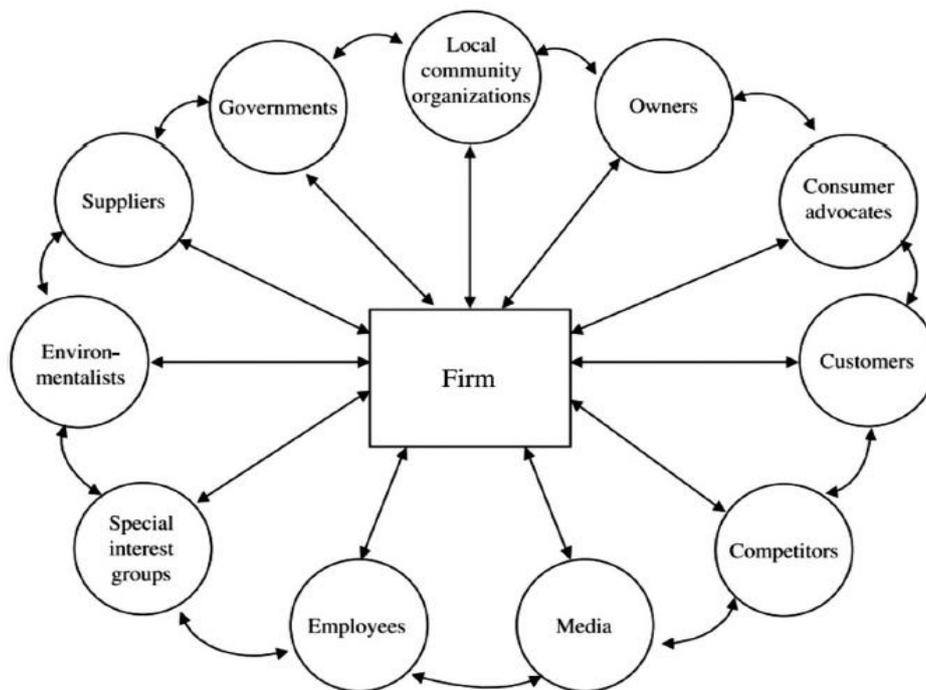
Ecosystem streams	Main characteristics	Example references
Business ecosystem Ecosystem consisting of both upstream and downstream value network actors and related technologies and institutions	a) Business ecosystems emphasizing collaboration and supply chain aspects b) Business ecosystems emphasizing the co-evolution of competition and collaboration	Iansiti & Levien, 2004; Adner, 2017 Moore, 1993; Li, 2009
Innovation ecosystem Ecosystem consisting of actors, technologies, and institutions that enable innovation	a) Firm-centric innovation ecosystems related to the focal actor and its technology, platform, brand, etc., connecting the various actors or stakeholders around it b) National or regional innovation systems c) Technological innovation systems	Rohrbeck, Hölzle, & Gemünden, 2009; Ritala et al., 2013; Autio & Llewellyn, 2014; Dattée et al., 2017 Fukuda & Watanabe, 2008; Clarysse et al., 2014 Markard & Truffer, 2008
Entrepreneurial and start-up ecosystems Ecosystems enabling the emergence and growth of new businesses	Start-up and entrepreneurial ecosystems that are often located in particular geographical areas or around a certain industry	Isenberg, 2010; Berger & Kuckertz, 2016; Acs et al., 2017
Platform ecosystem Ecosystems based on a digital platform	Ecosystems typically owned or governed by a “hub actor” or “platform leader” that connects various sides of markets to facilitate exchange and value creation	Gawer & Cusumano, 2002, 2014; Thomas et al., 2014; Wareham et al., 2014; Eloranta & Turunen, 2016
Service ecosystem Ecosystem approach based on servicedominant logic	Ecosystems emphasizing the systemic and institutional nature of value (co)creation with a focus on service exchange and resources	Vargo & Lusch, 2010; Lusch & Nambisan, 2015; Vargo et al., 2015; Banoun, Dufour, & Andiappan, 2016; Kohtamäki & Rajala, 2016; Taillard, Peters, Pels, & Mele, 2016

Sumber: L. Aarikka-Stenroos, P. Ritala (2017)

Dalam berbagai pandangan para ahli tentang ekosistem kewirausahaan, terdapat dimensi yang melekat pada ekosistem untuk mendukung kewirausahaan. Dimensi ini kemudian menjadi penentu kompleksitas sebuah ekosistem kewirausahaan yang berhubungan dengan jumlah aktor dan faktor yang terkait. Dimensi yang ada dalam ekosistem dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yakni sosial, politik, ekonomi dan juga budaya (Isololipu, 2018). Komponen dari seluruh ekosistem usaha yang dihasilkan oleh para ahli sangat erat kaitannya dengan kategori tersebut seperti yang teridentifikasi adalah budaya pendukung, modal ventura, jaringan aktif pengusaha, pejabat pemerintah daerah, investor, universitas dan layanan pendukung (Isenberg, 2011; Feld, 2012; Suresh et al., 2012; Mazzarol, 2014; Erik Stam, 2015; Spigel, 2017).

Selain ke-4 dimensi tersebut, terdapat juga atribut material yang berisikan universitas, pelayanan dan fasilitas pendukung, kebijakan pemerintah dan pasar (Stam dan Spigel, dalam Isololipu 2018). Dimensi material bersama dengan dimensi sosial, politik,

ekonomi dan budaya perlu dirancang untuk saling mendukung dan melahirkan kewirausahaan terutama untuk merancang dimensi material dalam memberikan dukungan pajak, investasi dalam pembiayaan publik dan peraturan birokrasi (Huggins dan Williams, 2011, dalam Isololipu 2018). Selanjutnya disebutkan juga para pemangku kepentingan yang merupakan kelompok-kelompok yang memberikan dukungan untuk berlangsungnya sebuah usaha karena dukungan dari para pemangku kepentingan menjamin usaha lahir dan berjalan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Freeman (1984) memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk pengembangan model ekosistem kewirausahaan, menyelaraskan prioritas, membangun kemampuan kelembagaan baru dan membina sinergi antara pemangku kepentingan yang berbeda (Rodríguez-Pose, 2013; Warwick, 2013). Menurut Freeman (1984), pemangku kepentingan dapat berupa individu atau kelompok individu yang terkena dampak dari atau bagi perusahaan atau dapat berdampak pada pencapaian tujuannya.



Gambar 2. Peta Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem Kewirausahaan

Sumber : Freeman (1984)

Ekosistem kewirausahaan menurut Isenberg (2011) terdiri dari 6 (enam) dimensi yang di dalam 6 (enam) dimensi tersebut masih memiliki banyak elemen. Isenberg (2011) membagi ekosistem kewirausahaan menjadi budaya, kebijakan, keuangan, *human capital*, pasar dan dukungan kelembagaan dan infrastruktur. Seluruh dimensi di atas kemudian melakukan interaksi yang saling mempengaruhi dan menghasilkan antar

satu sama lain (Spigel, 2015). Selain itu hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah kaitan antar aktor pemangku kepentingan dalam ekosistem (Xaver Neumeyer dan Susana C. Santo, 2017). Ekosistem memperlihatkan interaksi antara aktor di ekosistem dan juga akses ke seluruh sumber daya yang ada dimana pemerintah berperan sebagai latar belakang (Stam, 2015).

Tabel 3. Dimensi dalam Ekosistem Kewirausahaan

Isenberg (2011)	Stam dan Spigel (2017)	Suresh dan Ramraj (2012)	WEF (2016)	Mazarol (2014)
Policy	Government		Regulatory and Infrastructure framework	Regulatory, Legislative and Government Policies Framework
Infrastructure				Infrastructure
Cultural	Social Support	Social Support	Culture Support	Culture
Humans Capital	Beliefs		Humans Capital and workforce	Workforce and Human Capital
Market	Open Market	Market Support	Accesible Market	Market
	University		Major Universities	Major Universities as catalysts
Finance	Finance	Financial Support	Finance	Finance
		Government and Network Support	Support System	Support System (Mentor/Advisor)
		Supprot of Technology	Training and education	Education and Training
		Environmental (Climate, Natural)		

Sumber : Pierre, Foleu, Abdulnour Nomo and Fouda, 2015

Membangun Ekosistem Kewirausahaan bagi Usaha Mikro dan Kecil

Membangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia perlu memperhatikan budaya kewirausahaan yang masih dalam tahap sangat dini dan belum matang (Kurniawan, 2015). Di Indonesia diyakini bahwa pola pikir pengusaha masih lebih terfokus pada keuntungan yang instan dibandingkan pada pembangunan usaha yang berkelanjutan (Kurniawan, 2015). Membangun usaha yang berkelanjutan memiliki konsekuensi waktu yang panjang dan melelahkan, karena me-

merlukan pembangunan manusia, jejaring dan sumberdaya lainnya (Kurniawan, 2015).

Beberapa studi yang dilakukan di negara-negara berkembang menyoroti beberapa tantangan paling kritis dalam membangun ekosistem kewirausahaan, menurut yang diwawancarai, dan hambatan ini sekarang telah dikelompokkan berdasarkan tiga tantangan utama, yakni : (1) Penghalang dalam diri pengusaha yang meliputi: (a) kurangnya pengetahuan yang diperlukan (perencanaan, akuntansi, administrasi, keuangan, budaya persaingan, dan kurangnya keakraban dengan layanan yang diberikan),

(b) kurang percaya diri, (c) kurangnya keterampilan kerja, (d) keengganan untuk menerima konsep. (2) Penghalang kelembagaan meliputi: (a) kurangnya layanan dukungan (tidak ada peta prosedur yang jelas, proses panjang, keengganan untuk menerapkan pelayanan satu pintu dengan prosedur yang jelas, dan tidak ada pembaruan dengan kegiatan baru), (b) lemahnya peraturan dan administrasi. Dan (3) Penghalang keuangan dan pasar meliputi: (a) jaminan diberikan kepada lembaga pendanaan, (b) jaringan, (c) kebijakan pendanaan dan ketentuan asuransi, (d) menemukan pelanggan atau pemasok, (e) monopoli (perdagangan tersembunyi) (Al Barwani *et al.*, 2014; Ashrafi *et al.* 2014; Bureau 2015; Jansen 2017; Magd dan McCoy 2014; Rajasekar 2014; Saqib *et al.* 2017; Talal, 2017).

Berbagai lembaga Pendidikan di Indonesia harus menjadi kunci dalam mendukung lahirnya ekosistem kewirausahaan yang mampu mendukung usaha mikro dan kecil. Lembaga pendidikan kewirausahaan mulai sekolah dasar, menengah dan tinggi perlu terus menanamkan kewirausahaan sehingga kemudian menjadi norma-norma sosial yang ramah wirausaha dan mampu memperkuat hubungan positif antara pendidikan tinggi individu dan penciptaan bisnis baru (Lim, Kim, Chang & Swong, 2014). Program dukungan pemerintah untuk bisnis baru dan berkembang juga dapat memperkuat hubungan positif antara pendidikan tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan bisnis baru yang berorientasi inovasi (Lim, 2014).

Kemudian Lembaga sosial masyarakat sebagai sebuah komponen ekosistem kewirausahaan saat ini perlu meningkatkan kapasitasnya dalam keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan langsung dari pengusaha sukses seperti Ciputra, Sandiaga Uno, dan lainnya (Hermanto, 2017). Pembentukan komunitas wirausaha di masing-masing daerah atau sektor usaha diyakini juga memberikan dampak terhadap pengembangan kewirausahaan di Indonesia (Hermanto, 2017)

Pemerintah sebagai aktor dalam ekosistem perlu melahirkan kebijakan dan regulasi yang berdampak dalam kewirausahaan pada tingkat mikro, meso, dan makro (Mirzanti, 2015). Pemerintah juga belum mampu melahirkan intervensi yang jelas untuk mendorong kemunculan ekosistem wirausaha dan merangsang proses-proses utama yang mendukung lahir dan berkembangnya usaha mikro dan kecil (Mirzanti, 2015). Peran kelembagaan pemerintah untuk memberikan arahan kebijakan bagi pembangunan ekonomi nasional menjadi penting. Fokusnya tidak harus terutama pada penyediaan modal tetapi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dengan memberikan kebijakan utama yang akan beresonansi dengan baik dengan beragam kelompok pemangku kepentingan yang secara simbiotik mendorong pertumbuhan ekosistem wirausaha (Isenberg, 2011).

Komponen lain yang sama pentingnya dalam ekosistem kewirausahaan adalah dunia perbankan. Bank-bank saat ini memiliki skema khusus dalam mempromosikan kegiatan kewirausahaan dalam bentuk pemberian kredit bisnis (KUR). Setiap tahun, kredit yang diberikan kepada pengusaha dalam skema KUR ini terus meningkat secara signifikan.

Seluruh komponen dalam ekosistem kewirausahaan telah lahir dan berjalan namun komponen-komponen tersebut belum terjalinkan menjadi satu kesatuan yang saling berinteraksi untuk mendukung satu sama lain. Pengusaha yang menerima pelatihan dari kementerian atau lembaga tertentu tidak harus dibimbing oleh pengusaha yang sukses. Mahasiswa yang memulai bisnisnya sejak kuliah juga belum tentu mendapatkan KUR dari bank (Hermanto, 2017).

SIMPULAN

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan serta sintesis literatur yang tersedia mengenai ekosistem kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil yang menitikberatkan pada komponen-komponen di dalamnya yakni kebijakan,

infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, pasar, dan sosial dan seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem kewirausahaan.

Konsep ekosistem kewirausahaan menjadi aspek penting untuk usaha mikro dan kecil karena diyakini mampu menjadi sebuah ekosistem sehat yang menjadi tempat lahir dan tumbuhnya usaha yang berkelanjutan. Ekosistem kewirausahaan perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang terkait dan saling mendukung di antara para aktor di dalamnya guna memberikan rangsangan dan pengaruh positif bagi usaha mikro dan kecil.

Penelitian mengenai ekosistem kewirausahaan di Indonesia perlu ditingkatkan dan dikembangkan supaya dapat memberikan konsepsi gambaran ekosistem kewirausahaan yang cocok dengan karakter kewirausahaan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aarika-Stenros, Leena & Ritalo, Pavao. (2017). Network Management in the Era of Ecosystems: Systematics Review and Management Framework. *Journal of Industrial Marketing Management*.
- Acs, Zoltan. Stam, Erik. Audretsch, B David & O'Connor, Allan. (2017). The Lineages of the Entrepreneurial Ecosystem Approach. *Small Business Economics Journal*. Vol 49.
- Ajzen, Icek. (1991). Theory of Planned Behaviour. *Journal of Organizational Behaviour and Human Decision Processes*. Vol 50. Pp 179 – 211.
- Al Abri, M, Yahya. Rahim, A, Abdul. Hussain (2018). Entrepreneurial Ecosystem : An Exploration of the Entrepreneurship Model of SMEs in Sultanate Of Oman. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 9 No. 6. Pp 193-206.
- Audretsch, B. David & Belitski, Maksim. (2016). Entrepreneurial Ecosystem in Cities: Establishing the Framework Conditions. *The Journal of Technology Transfer*, Vol 42. Pp 1030 - 1051.
- Autio, Erkko. Levie, Jonathan. Hart, Marks & Acs, Zoltan. (2014). Global Entrepreneurship and Institution : An Introduction. *Small Business Economics Journal*. Vol 42. Pp 437 - 444.
- Cassar, Nicolas. (2014). Decoupling Economic Growth and Environmental Degradation : Reviewing Progress to Date in Small Island State of Malta. *Economic Papers Sustainability*. Vol 6. Pp 1-22.
- Chandler N, Gaylen. DeTienne R, Dawn. McKelvie, Alexander & Mumford V, Troy. (2011). Causation and Effectuation Process: a validation study. *Business Venturing Journal*. Vol 26. Pp 375 - 390.
- DeepaBabu. Manalel, James. (2016). Entrepreneurial Orientation and Firm Performances: A Critical Exam. *IOSR JBM Journal*. Vol 18,. Pp 21-28
- Hennart, F. Jean & Park, Y. Ryeol. (1993). Greenfield vs Acquisition : The Strategy of Japanese Investors in The United States. *Journal of Management Science*. Vol 39. Pp 1054-1070.
- Henrekson, Magnus & Sanandaji, Tino. (2014). Small Business Activity Does Not Measure Entrepreneurship. *Proceeding of National Academy of Science USA*. Vol 111. Pp 1760-1765.
- Hermanto, Bambang & Suryanto. (2017). Entrepreneurship Ecosystems Policy in Indonesia. *MJSS Journal*. Vol 8 No. 1. pp 110-115.
- Isenberg, Daniel. (2011). The Entrepreneurship Ecosystems Strategy as a New Paradigm of Economics Policy: Principle for Cultivating Entrepreneurship. *Babson Global*.
- Jacobides, G., Michael. Knudsen, Thorbjorn & Augier, Mie. (2006). Benefit from Innovation: Value Creation, Appropriation and the Role of Industry. *Research Policy Journal*. Vol 35. Pp 1200 – 1221.

- Jennen, T., Rigby, C. & Allum, J. (2016). Stakeholder Engagement in The Creation of an Entrepreneurial Ecosystems. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*, XII (1). Pp 3-33
- Jurado, Tanya & Bartiti, Mastina. (2019). The Evolution of SME Policy : The Case of New Zealand. *Regional Studies. Regional Science*, Vol 6.1. pp 32-54.
- Krueger F, Norris & Carsurd, Alan. (1993). Entrepreneurial Intentions : Applying Theory of Planned Behaviour. *Journal of Entrepreneurship and Regional Development*. Volume 5. Pp 315 – 330.
- Malecki, E . J (2011). Connecting Local Entrepreneurial Ecosystem to Global Innovation Network: Open Innovation, Double Networks and Knowledge Integration. *International Journal Entrepreneurship and Innovation Management*, Vol 14, No.1. pp 36-59.
- Mason, Colin & Brown, Ross. (2014). Entrepreneurial Ecosystem and Growth Oriented. *OECD*.
- Mirzanti, Simatupang & Larso. (2015). Entrepreneurship Policy Implementation Model In Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*.
- Neumeyer, Saver & Santos, C. Susana. (2017). The Effect of Team Conflict on Teamwork Performance. *International Journal of Engineering Education Perspective*. Vol 36. Pp 502-509.
- Nur Wanita (2015). Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Palu. *Jurnal Penelitian Ilmiah LP2M IAIN Palu*. Vol 3.
- Olugbola A, Seun. (2017). Exploring Entrepreneurial Readiness of Youth and Start-Up Success Component: Entrepreneurship Training as a Moderator. *Journal of Innovation and Knowledge*.
- Reymen, Isabelle. Berends, Rob, Oudehand & Stultiens, Rutger. (2016). Decision Making for Business Model Development. *Research and Development Management*. Vol 47. Pp 595 - 606.
- Sarasvati D, Saras & Dew, Nicolas. (2005). Creation New Market Through Transformations. *Evolutionary Economics Journal*. Vol 15. Pp 533-565.
- Simatupang, Togar. Schwab, Andreas & Lantu, C. Donald. (2015). Building Sustainable Entrepreneurial Ecosystem. *Iowa State Digital Repository*, Vol 7.
- Sondari, Mery. (2014). Is Entrepreneur Education Really Needed ? Examining the Antecedent of Entrepreneurial Career Intention. *Proceeding of Social dan Behavioural Science*. Vol 115. Pp 44 – 53.
- Sorama & Joensuu – Salo (2016). *A Case Study of Entrepreneurial Ecosystems Related to Growth Firm*. Proceeding of the European Conference 11. Jyvaskyla Vol 15 Pp 754 – 761.
- Spigel, Ben & Harisson, Richard (2015). Toward Processes Theory of Entrepreneurial Ecosystem. *The Strategic Entrepreneurship Journal* Vol: 12. Pp 151 – 168.
- Stam & Spiegel. (2016), Entrepreneurial Ecosystems. Discussion Paper Series *Utrecht School of Economics*. Tjalling Koopmans Research Institute.